



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: kaltimpost.co.id

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																											√			

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
				√							

TAHUN

2015

HALAMAN

-

Kaltara Raih Opini WTP? Badrun: Kepastiannya Hari Jumat

TANJUNG SELOR – Target Penjabat (Pj) Gubernur periode 2013-2015 Irianto Lambrie untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan sepertinya bakal terwujud.

Informasi yang diperoleh, Kalimantan Utara (Kaltara) termasuk salah satu provinsi yang memperoleh opini WTP. Pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara pun sudah ada yang bergembira mendengar kabar tersebut. Apalagi Kaltara merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang baru berusia dua tahun.

Dikonfirmasi kabar tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Badrun pun semakin memperjelas bahwa Kaltara meraih opini WTP. “Alhamdulillah,” ujar Badrun ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (27/5) kemarin.

Menurutnya, opini WTP merupakan harapan Pemprov Kaltara. Karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu ditekankan kepada pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tapi saya belum bisa pastikan bahwa Kaltara meraih opini WTP. Kita lihat aja nanti saat diserahkan di rapat paripurna istimewa di dewan,” ujar Badrun.

Rencananya, rapat paripurna istimewa penyerahan opini dari BPK kepada DPRD dan Pemprov Kaltara dilaksanakan Jumat (29/5) besok. “Yang pastinya hari Jumat itu. Nanti BPK menyerahkan kepada ketua dewan dan Pj Gubernur. Kalau memang terwujud (raih opini WTP), *alhamdulillah*. Apalagi kita (Kaltara) sebagai daerah otonomi baru,” kata Badrun.

Ia juga mengatakan bahwa Pemprov Kaltara telah berupaya bekerja sungguh-sungguh dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jika benar nantinya Kaltara menerima opini WTP, penghargaan tersebut, kata Badrun, merupakan tantangan Pemprov Kaltara untuk mengarah pada prinsip pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kalaupun sebaliknya, misal meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), hal tersebut, kata Badrun, akan menjadi bahan evaluasi agar ke depannya penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kaltara meraih opini WTP.

“Kami akan terus mengupayakan bagaimana bisa lebih baik. Yang kurang diperbaiki, demi mewujudkan tata kelola keuangan, aset dan pemerintahan yang baik melalui koridor aturan-aturan yang ada,” urainya. (adv/hmsprov/one/k15)